



RENJA 2022 KECAMATAN BURAU

KABUPATEN LUWU
TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sesuai dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, RENJA ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. RENJA memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Burau tahun 2022. Dalam RENJA juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Penyusunan RENJA ini secara teknis berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi Masyarakat.

Burau, 05 Juli 2021
CAMAT,

MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Pangkat :Pembina-IVa

NIP. : 19800112 200604 1 016

DAFTAR ISI**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Riviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V: PENUTUP**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD). Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu Perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Burau tahun 2022, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**. Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan Misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-4 yaitu “Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”** “. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Burau mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD paPda tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Burau. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Burau Tahun 2022, merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

20.1. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Burau Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelayanan dalam rangka mengoptimalkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Burau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Burau tahun 2022 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Burau kedalam program/kegiatan tahunan.
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Burau;
6. Mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Burau melalui capaian target kinerja program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat Burau kepada DPRD;
8. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Burau Tahun 2022
9. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja Kecamatan Burau Tahun 2022.

20.2. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Burau Tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Selanjutnya guna memberikan gambaran capaian kinerja RKPD tahun sebelumnya dilakukan evaluasi hasil pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi renstra. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Burau tahun 2020 s.d Tahun berjalan(*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Tahun Lalu
Kabupaten Luwu Timur

SKPD : KANTOR KECAMATAN BURAU

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020 (n-2) | | | Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021 (n-1) | | Catatan |
|------|---|---|---|---|--|-----------|-----------------------|--|--|---------------------|---------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian (%) | |
| FIX1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|---------|
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu | 2 | Dok | | | | | 2 | Dok | 2 | Dok | 100.00% | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 10 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 1 | Dok | 100.00% | 10 | Dok | 12 | dok | 120.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100.00% | 100 | % | 300 | | 300.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | 22 | Org | 22 | Org | 22 | Org | 22 | Org | 100.00% | 22 | Org | 66 | Org | 300.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 18 | Dok | | | | | | | 18 | Dok | 18 | Dok | 100.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan | 100 | % | | | | | | | 100 | % | 100 | | 100.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu | 4 | Dok | | | | | | | 4 | Dok | 4 | Dok | 100.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%) | 100 | % | | | | | | | 100 | % | 100 | | 100.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.04 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu | 12 | Dok | | | | | | | 12 | Dok | 12 | Dok | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|--|--|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 7 | 1 | 1 | 2.1 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 100 % | - | - | 100 % | 200 | 200.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan | 29 Paket | | | | 29 Paket | 29 Paket | 100.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | 12 Dok | | | | 12 Dok | 12 Dok | 100.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Org | 3 Org | 0 | | 3 Org | 6 Org | 200.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.1 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00% | 300 | 300.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 9 Jenis | 7 Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 100.00% | 11 Jens | 27 Jenis | 300.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | | | 14 Jenis | 16 Jenis | 800.00% | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 4 Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 100.00% | 7 Jenis | 15 Jenis | 375.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|---|--|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---------|------|-------|--------|-------|----------|
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 48 | Exp | 60 | Exp | 24 | Exp | 24 | Exp | 100.00% | 48 | Exp | 132 | Exp | 275.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | 3813 | Org | 5716 | Ktk | 3800 | Ktk | 3697 | Ktk | 97.29% | 4020 | Org | 13,433 | Ktk | 352.29% |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 714 | Kali | 924 | Kali | 662 | Kali | 662 | Kali | 100.00% | 831 | Kali | 2,417 | Kali | 338.52% |
| 7 | 1 | 1 | 2.1 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%) | 100 | % | 100 | % | - | - | - | - | 100.00% | 100 | % | 200 | | 200.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 6 | Unit | 2 | Unit | | | | | | 44 | Unit | 46 | Unit | 766.67% |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan | 2 | Unit | 5 | Unit | | | | | | 2 | Unit | 7 | Unit | 350.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 2 | Unit | 3 | Unit | | | | | | 3 | Unit | 6 | Unit | 300.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.1 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100.00% | 100 | % | 300 | | 300.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan | 1.5 | Surat | 1400 | Surat | 800 | Surat | 800 | Surat | 100.00% | 1500 | Surat | 3,700 | Surat | 2,466.67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|--|--|-----|-------|-----|----------|-----|------|-----|------|---------|-----|-------|-----|-------|---------|
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | 120 | Rek | 120 | Rekening | 120 | Rek | 120 | Rek | 100.00% | 120 | Rek | 360 | Rek | 300.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 2 | Jenis | 2 | Jenis | | | | | | 2 | Jenis | 4 | Jenis | 200.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 | Org | 3 | Org | 3 | Org | 3 | Org | 100.00% | 7 | Org | 13 | Org | 433.33% |
| 7 | 1 | 1 | 2.1 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100.00% | 100 | % | 300 | | 300.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 3 | Unit | 3 | Unit | 3 | Unit | 3 | Unit | 100.00% | 3 | Unit | 9 | Unit | 300.00% |
| | | | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang di Pelihara | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 | Unit | 3 | Unit | 12 | Unit | 12 | Unit | 100.00% | 12 | Unit | 27 | Unit | 270.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 | Unit | 3 | Unit | 3 | Unit | 3 | Unit | 100.00% | 3 | Unit | 9 | Unit | 450.00% |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 6 | Unit | 8 | Unit | | | | | | 5 | Unit | 13 | Unit | 216.67% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum | 100 % | 100 % | 100 % | 114 % | 114.00% | 100 % | 314 | 314.00% |
| 7 | 1 | 2 | 2 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 114 % | 114.00% | 100 % | 314 | 314.00% |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar) | 100 Lbr | 196 Lbr | 100 Lbr | 114 Lbr | 114.00% | 100.00 Lbr | 410 Lbr | 410.00% |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung 100 % Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00% | 100 % | 300 | 300.00% |
| 7 | 1 | 3 | 2 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00% | 100 % | 300 | 300.00% |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 40 % | 38 % | 40 % | 40 % | 100.00% | 40 % | 118 % | 2.95 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 % | 95 % | 100 % | 90 % | 90.00% | 66 Org | 251 Org | 251.00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|--|--|--------|-------|-------|-------|---------|----------|---------|----------|
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95.00% | 100 % | 295 | 295.00% |
| 7 | 1 | 5 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95.00% | 100 % | 295 | 295.00% |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | 100% % | 95 % | 100 % | 95 % | 95.00% | 100.00 % | 290 % | 290.00 |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban | 100% % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00% | 100 % | 300 | 300.00 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%) | 100% % | 100 % | 100 % | 100 % | 100.00% | 100 % | 300 | 300.00 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Cakupan desa yang Terfasilitasi Rancangan Perdes APBDesnya | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100.00% | 22 Dok | 217 Dok | 217.00% |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Kasus Pengaduan yang Ditindaklanjuti (%) | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100.00% | 100 % | 295 % | 295.00% |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun | 4 Dok | 4 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 100.00% | 100 % | 106 % | 2650.00% |

Pelaksanaan program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2020 selanjutnya dilakukan pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan rencana pembagynan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian sepeeti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Kriteria capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD tahun 2020

| No. | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Simbol | Interval Nilai Realisasi Kinerja 1 tahun |
|-----|--------------------------------------|--------|--|
| 1. | Sangat Tinggi | ST | 91 % ≤ 100 % |
| 2. | Tinggi | T | 76 % ≤ 90 % |
| 3. | Sedang | S | 66 % ≤ 75 % |
| 4. | Rendah | R | 51 % ≤ 65 % |
| 5. | Sangat Rendah | SR | ≤ 50 % |

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan pada evaluasi hasil RKPD tahun 2020, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD diperoleh nilai 98,61, sedangkan untuk relisasi anggaran nilainya mencapai 98,81%. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, Evaluasi hasil RKPD Kecamatan Burau tahun 2020 termasuk dalam kategori **“sangat tinggi”**, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori **“sangat tinggi”**. Namun demikian rendahnya realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor, sehingga diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kecamatan Burau agar tidak menimbulkan silpa dalam jumlah yang besar.

Pada tahun 2020 Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 9 (Sembilan) program dan 27 (dua puluh Tujuh) kegiatan. Dari beberapa program dan kegiatan tersebut, ada beberapa program dan kegiatan yang terealisasi 100% dan ada juga yang kurang dari 100%, adapun rincian capaian kinerja dan realisasi anggaran Kecamatan Burau tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan surat masuk dan surat keluar dengan target kinerja sebanyak 600 Lembar dan teralisasi 600 Lembar dengan target anggaran sebesar Rp. 1.770.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.770.000 (100 %)
- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan Faximile dengan target kinerja sebanyak 72 rekenening dan teralisasi 72 rekening (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.000.000 (100%)
- *Penyediaan Jasa Peralatan Kantor*
Adapun Target dari Kegiatan ini adalah terbayarnya Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 jenis dan terealisasi 2 jenis dengan target anggaran Rp. 2.100.000 dan terealisasi 2.100.00 (100%)
- *Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*
Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor Camat Burau setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 23 jenis dan terealisasi sebanyak 23 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 29.272.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.272.000 (100%)
- *Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*
Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor dengan target kinerja sebanyak 6 unit dan terealisasi sebanyak 6 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 13.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.250.000 (100%)
- *Penyediaan Alat Tulis Kantor*
Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor dengan target kinerja sebanyak 33 jenis dan terealisasi 33 jenis dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.00 dan terealisasi 10.000.00 (100%)
- *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja sebanyak 11 jenis dan terealisasi

sebanyak 11 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.959.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.959.000 (100 %)

- *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar dengan target kinerja sebanyak 60 exemplar dan terealisasi sebanyak 60 exemplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.240.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.240.000 (100%)
- *Penyediaan Makan dan Minuman*
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan makan dan minum dengan target 5370 kotak dan terealisasi 5370 dengan target anggaran Rp. 166.825.000 dengan realisasi 166.825 (100%)
- *Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah*
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja 22 kali dan terealisasi sebanyak 22 kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 55.215.000 dengan realisasi sebesar Rp. 55.215.00 (100%)
- *Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis*
Target dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran honorarium upah jasa dengan target kinerja sebanyak 4 orang dan terealisasi sebanyak 4 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 54.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 54.000.000 (100%)
- *Kunjungan Kerja Dalam Daerah*
Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 888 kali dan terealisasi sebanyak 662 (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 120.291.000 dan terealisasi sebesar Rp. 120.291.600 (100 %)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- *Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
Target dari kegiatan ini adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target sebanyak 4 unit dan terealisasi 4 unit dengan target anggaran Rp. 20.000.000 dan terealisasi 20.000.00 (100%)
- *Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas*
Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000 (100 %).
- *Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor*

Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor dengan target kinerja sebanyak 3 paket dan terealisasi sebanyak 3 paket (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 17.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.000.000 (100 %)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Target dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 42.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.500.000(100%)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target kinerja 5 orang dan terealisasi sebanyak 0 orang (0%) dengan target anggaran Rp. 20.950.000 dan terealisasi sebesar Rp 0 (0%)

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- *Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000 (100 %)

5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- *Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD*

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dengan target kinerja sebanyak 6 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp 5.496.300 dan terealisasi sebesar Rp. 5.496.300 (100 %)

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Fasilitasi pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan

Indikator dari kegiatan yaitu rasio keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target kinerja sebanyak 0,40% dan terealisasi sebanyak 0,40% (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.699.700 dan terealisasi sebesar Rp. 16.699.700 (100 %)

- Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Target dari kegiatan yaitu tersusunnya rancangan peraturan APBDes dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan target anggaran sebesar Rp. 2.350.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.350.000 (100 %)

- Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa.
Target dari kegiatan yaitu terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target kinerja sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 90% dengan target anggaran sebesar Rp. 46.521.700 dan terealisasi sebesar Rp. 46.521.700 (99,99 %)
- 7. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan**
- Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
Target dari kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan target anggaran sebesar Rp. 25.550.000 dan terealisasi sebesar Rp. 25.550.000 (100 %)
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi desa dengan target kinerja sebanyak 4 Dokumen dan terealisasi sebanyak 4 (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.084.900 dan terealisasi sebesar Rp. 16.084.900 (100 %)
- 8. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Keterlibatan**
- Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
Target dari kegiatan yaitu tertanganinya kasus-kasus yang ada dengan target kinerja sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 100 % (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 12.276.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.276.000 (100 %)
- 9. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum**
- Fasilitasi pelayanan administrasi perizinan
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi perizinan dengan target kinerja sebanyak 150 lembar dan terealisasi sebanyak 150 lembar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.956.088,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.956.000 (99,66 %).

Sedangkan pada tahun 2021 program sebanyak 5 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Adapun capaian program/kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator outcome program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar, dengan target indikator program sampai dengan triwulan I sebesar 100% dan terealisasi 99,35% dan target anggaran sebesar Rp. 2.973.756.986,- dan terealisasi sebanyak Rp. 2.881.640.930 atau sebesar 96,90%. Rendahnya capaian kinerja program disebabkan karena

kegiatan yang terlaksana di awal tahun belum berjalan maksimal berhubung karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi covid 19. Adapun kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut;

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja 3 dokumen namun belum terealisasi dengan target anggaran sebesar Rp. 14.148.191,- dan terealisasi sebesar Rp. 568,603 (4,02 %). Target kinerja belum terealisasi karena pembuatan renstra 2021-2026 sementara dlm proses penyusunan dokumen.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

Indikator kinerja dari sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 3.694.072 belum terealisasi karena anggaran kasnya pada triwulan 3 (tiga).

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD

Indikator kinerja dari sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.470.455 dan terealisasi sebesar Rp. 1.299.560,- (37,45 %). Dokumen yang terealisasi adalah dokumen DPA TA. 2021.

d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen dan terealisasi 4 dokumen (60%) dengan target anggaran sebesar Rp. 17.483.606 dan terealisasi sebesar Rp. 2.439.241,- (13,95 %). Adapun Dokumen yang tersusun adalah dokumen LAKIP tahun 2020, dokumen LKPJ tahun 2020, dokumen Evaluasi RKPD, dokumen evaluasi SAKIP.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan dengan target kinerja 22 dokumen dan

terrealisasi 22 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.218.719.971 dan terealisasi sebesar Rp. 272.986.178,- (12,30 %).

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja 18 dokumen dan terealisasi 4 dokumen (22,22%) dengan target anggaran sebesar Rp. 24.485.027,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.391.700,- (5,68 %).

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dengan target kinerja 4 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (25%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.699.790 dan terealisasi sebesar Rp. 879.700 (8,22 %).

1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dengan target kinerja 12 dokumen dan terealisasi 3 dokumen (25%) dengan target anggaran sebesar Rp. 37.303.689 dan terealisasi sebesar Rp. 1.732.496 (4,64 %).

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan dengan target kinerja 29 stel dengan target anggaran sebesar Rp. 18.750.000 belum terealisasi berhubung anggaran kasnya pada triwulan II.

- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan dengan target kinerja 12 dokumen dan terealisasi 3 dokumen (25%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.088.739 dan terealisasi sebesar Rp. 707.123 (2289 %).

- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan dengan target kinerja 3 orang dan target anggaran sebesar Rp. 12.850.000 belum terealisasi karena belum ada undangan kegiatan terkait pelaksanaan bimtek ASN.

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja 11 jenis dan terealisasi 10 jenis (90,91%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.709.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 699.800 (25,83%).

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja 14 jenis dan terealisasi 13 jenis (23,21%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.426.650 dan terealisasi sebesar Rp. 1.089.600(24,61 %).

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah barang cetak dan digandakan dengan target kinerja 7 jenis dan terealisasi 4 jenis (14,29%) dengan target anggaran sebesar Rp. 8.995.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.208.500 (13,44 %).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja 48 eksamplar dan terealisasi 2 eksamplar (4,17%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 250.000 (5,21 %).
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya dengan target kinerja 4.020 orang dan terealisasi 1.038 orang (25,82%) dengan target anggaran sebesar Rp. 140.715.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.164.000,- (8,64 %).
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dengan target kinerja 831 kali dan terealisasi 102 (12,27%) dengan target anggaran sebesar Rp. 181.190.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.248.500,- (8,42 %).

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Semua sub kegiatan pengadaan barang jasa milik daerah sampai dengan triwulan I tidak dilaksanakan berhubung anggaran kasnya terletak pada triwulan II.

1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan dengan target kinerja 1.500 surat dan terealisasi 170 surat (11,33%) dengan target anggaran sebesar Rp. 17.587.973 dan terealisasi sebesar Rp. 3.455.309 (19,65 %).
- b. penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan dengan target kinerja 120 rekening dan terealisasi 30 rekening (25%) dengan target anggaran sebesar Rp. 52.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.425.808,- (19,71 %).

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 2 jenis dan target anggaran sebesar Rp. 6.500.000 tidak terealisasi berhubung karena pelaksanaan kegiatan rutinitas safari ramadhan untuk tahun ini tidak dilaksanakan untuk menghindari keramaian akibat vandemi covid-19.

d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan dengan target kinerja 7 orang dengan target anggaran sebesar Rp. 44.400.000 belum terealisasi berhubung belum ada regulasi terkait pembayaran honorarium tenaga upah jasa. Demikian halx dengan honorarium pejabat pengadaan belum terbayarkan berhubung karena proses belanja modal belum dilaksanakan.

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target kinerja 3 unit (mobil dinas dan 2 unit kendaraan bermotor) dan terealisasi 3 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 18.870.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.548.000,- (24,10 %).

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 12 unit dan terealisasi 3 unit (25%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.430.000 dan terealisasi sebesar Rp. 660.000 (8,88 %).

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja 3 unit dengan target anggaran sebesar Rp.

18.000.000 belum terealisasi karena persediaan anggar kas pada triwulan II.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja 5 unit dengan target anggaran sebesar Rp. 3.900.000 belum terealisasi karena persediaan anggar kas pada triwulan II.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan dengan target kinerja 100 lembar dan terealisasi 14 lembar (14%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.098.916 dan terealisasi sebesar Rp. 449346,- (10,96 %).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dengan target kinerja 40% dan terealisasi 66% (165%) dengan target anggaran sebesar Rp. 13.956.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.830.750,- (56,11 %). Kegiatan musrenbang Kecamatan Burau dihadiri peserta sebanyak 100 orang dengan jumlah partisipasi perempuan dalam kegiatan musrenbang sebanyak 40 orang dan laki-laki sebanyak 60 orang. Terkait usulan desa dalam musrenbang Kecamatan Burau tahun 2021 dari 11 desa sebanyak 22 usulan.

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan dengan target kinerja 66 orang dan terealisasi 66 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 60.869.226 dan terealisasi sebesar Rp. 6.932.500 (11,39 %).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100% (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 31.406.625 dan terealisasi sebesar Rp. 5.600.000 (17,83 %).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya dengan target kinerja 22 dokumen dengan target anggaran sebesar Rp. 3.213.105 belum terealisasi karena pelaksanaan kegiatan penyusunan APBDes dan Perkades dilaksanakan pada triwulan II.

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100% (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.811.865 belum terealisasi. Terkait belum adanya realisasi anggaran hanya karena keterlambatan pertanggungjawaban oleh bendahara dan akan dipertanggungjawabkan pada GU berikutnya.

c. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Persentase desa yang tertib administrasinya dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100% (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.811.865 dan terealisasi sebesar Rp. 3.305.000,- (18,54 %). Setelah melakukan monitoring dan evaluasi administrasi ke 11 desa maka terdapat 3 desa yang telah mematuhi kriteria tertib administrasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Burau

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKU | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|----------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| | | | | (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n) | (thn n+1) | (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n) | (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat | | | 78,21 | 78,21 | 80 | 81 | 84,82 | - | 86,30 | 86,50 | |
| 2 | Nilai LAKIP | | | 55 | 60 | 60 | 60 | 63,57 | - | 67 | 70 | |

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Burau sebagaimana tabel di atas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Burau

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021 terkait pelayanan publik di Kecamatan Burau, target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2020 Kantor Kecamatan Burau sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 78,21 dan terealisasi 84,82. Artinya pelayanan yang ada di Kecamatan Burau baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2021 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 78,21 namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan indeks kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2021 baru sampai triwulan I sedangkan penilaian dilakukan pada akhir tahun 2021.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Burau (LAKIP)

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Burau. Pada tahun 2020 target Nilai BB namun realisasi belum bisa digambarkan karena belum ada hasil penilaian dari inspektorat dan tahun 2021 dengan target nilai BB juga namun realisasi belum bisa digambarkan karena penilaian di lakukan pada awal tahun 2022. Capaian program maupun kegiatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan namun belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu :

- Adanya sebagian Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
- Penentuan target sasaran yang tidak dapat terukur
- Belum adanya dokumen Rencana Aksi
- Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2022 antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sarana dan prasarana masih kurang
3. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal
4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
5. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
- d. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa

2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Burau serta mengacu pada Renja Perangkat daerah (RKPD). Rancangan awal Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Ada beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya.

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan RKPD Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rancangan Awal RKP | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|---|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|---------------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Kebutuhan Dana (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | 3,096,312,820 | | | | | | | | | | | | | 3,479,822,100 | |
| 7 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2,959,589,513 | | | | | | | | | | | | | 3,320,822,100 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 38,796,324 | | | | | | | | | | | | | 43,000,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Dokumen | 100% | 14,148,191 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Dokumen | 100% | 9,148,191 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 15,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 3,694,072 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 3,694,072 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 4,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------|------------|------|----------------------|--------------------------------------|---|------|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--|------|---------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 3,470,455 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 3,470,455 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 4,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Dokumen | 100% | 17,483,606 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Dokumen | 100% | 17,483,606 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 20,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 2,243,204,998 | | | | | 2,131,634,977 | | | | | 2,275,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang di susun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 22 Orang | 100% | 2,218,719,971 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 22 Orang | 100% | 2,107,149,950 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 2,250,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang di susun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 18 Dokumen | 100% | 24,485,027 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 18 Dokumen | 100% | 24,485,027 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 25,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | 10,699,790 | | | | | 10,699,790 | | | | | 12,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|--|--|---|---|------|------------|------|-------------------|--------------------------------------|---|------|------------|------|------------|--------------------------------------|--|------|------------|--|------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu | Persentase Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 10,699,790 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 10,699,790 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | 100% | 12,000,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 37,303,689 | | | | | | | | 37,303,689 | | | | 50,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 37,303,689 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 37,303,689 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 50,000,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 34,688,739 | | | | | | | | 16,938,739 | | | | 27,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Maleku | 100% | 22 paket | 100% | 18,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Maleku | 100% | 22 paket | 100% | 1,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | 100% | 2,000,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Dokumen | 100% | 3,088,739 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Dokumen | 100% | 3,088,739 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | 100% | 5,000,000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Orang | 100% | 12,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Orang | 100% | 12,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%) | 100% | 20,000,000 | | |

| 7 | 1 | 1 | 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 342,83 5,900 | | | | | | 271,645 ,900 | | | | | | 384,000, 000 |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------|---|------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------|--|------|-------------|--|--|-----------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 11 Dokume | n 100 % | 2,709,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 11 Dokume | n 100 % | 2,709,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 4,000,000 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 14 Jenis | 100% | 4,426,650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 14 Jenis | 100% | 4,426,650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 5,000,000 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 6 Jenis | 100% | 8,995,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 6 Jenis | 100% | 8,995,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 10,000,000 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 48 Exemplar | 100% | 4,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 48 Exemplar | 100% | 4,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 5,000,000 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3800 Orang | 100% | 140,715,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3800 Orang | 100% | 100,715,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 160,000,000 | | | |

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Burau 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|--|---|---|---|------|----------|------|--------------------|--------------------------------------|---|------|----------|------|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 700 Kali | 100% | 181,190,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 700 Kali | 100% | 150,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | 200,000,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 828,221,000 | | | | | | 317,822,100 | | | 332,822,100 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | 275,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | 100% | 280,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | Pengadaan Mebel | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | Jumlah mebel yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 40 Unit | 100% | 58,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 40 Unit | 100% | 28,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | 100% | 28,250,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Unit | 100% | 13,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Unit | 100% | 8,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | 100% | 13,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 11,572,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 6,572,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%") | 100% | 11,572,100 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 121,037,973 | | | | | | 117,547,974 | | | 142,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|------|-------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|------|-------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1500 surat | 100% | 17,587,973 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1500 surat | 100% | 14,097,974 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | 100% | 20,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 120 Rekenin | g100 % | 52,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 120 Rekenin | g100 % | 52,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | 100% | 55,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Jenis | 100% | 6,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Jenis | 100% | 6,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | 100% | 7,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 7 Orang | 100% | 44,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 7 Orang | 100% | 44,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | 100% | 60,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 48,200,000 | | | | | | 48,200,000 | | | | 55,000,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 18,870,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 18,870,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | 100% | 20,000,000 |

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Burau 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|---|--|---|---|------|---------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|------|------------|------|------------|--------------------------------------|--|------|------------|-------------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Unit | 100% | 7,430,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Unit | 100% | 7,430,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 10,000,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 18,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 18,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 20,000,000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 5 Unit | 100% | 3,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 5 Unit | 100% | 3,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | 100% | 5,000,000 | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 4,098,916 | | | | | | | | 4,098,916 | | | | 5,000,000 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | 4,098,916 | | | | | | | | 4,098,916 | | | | 5,000,000 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan publik | Jumlah administrasi perizinan yang terbitkan (lembar) | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | | | | | 4,098,916 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 Lembar | 100% | 4,098,916 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 5,000,000 | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 74,825,786 | | | | | | | | 62,825,786 | | | | 70,000,000 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 74,825,786 | | | | | | | | 62,825,786 | | | | 70,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|------------|--------------------------------------|---|------|------------|------|-------------------|--------------------------------------|---|------|-------------------|-------------------|
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah (%) | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | | | | 13,956,560 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100% | 12,956,560 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | 100% | 15,000,000 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang) | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | | | | 60,869,226 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 66 Orang | 100% | 49,869,226 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | 100% | 55,000,000 | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | 12,000,000 | | | | 15,000,000 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi (%) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | | | | | | | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100% | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum | 100% | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|-------------------|--|--|---|---|---------|------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | | | | | | | | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Kali | 100% | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 5,000,000 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | | | 5,000,000 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada | | | | | | | | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Kali | 100% | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 5,000,000 | |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 31,406,625 | | | | | | | | 31,406,625 | | | | 35,000,000 | |
| 7 | 1 | 5 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | 31,406,625 | | | | | | | | 31,406,625 | | | | | 35,000,000 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Diselenggarakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | | | | | | | | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100% | 31,406,625 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | 100% | 35,000,000 |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 26,391,980 | | | | | | | | 25,391,980 | | | | 34,000,000 | |

| 7 | 1 | 6 | 2 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 26,391,980 | | | | | | 25,391,980 | | | | 34,000,000 | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|------------|------------|--------------------------------------|---|------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--|---|------|------------|
| 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | | | | 3,213,105 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 22 Dokumen | 100 Persen | 3,213,105 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | 100% | 4,000,000 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | | | | 6,811,865 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 Persen | 6,811,865 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | 100% | 8,000,000 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | | | | 16,367,010 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 Persen | 12,367,010 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | 100% | 18,000,000 |

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Burau 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--------------|----------------|---------------|--|--|--|---|------|---------|------------|-----------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| 7 | 1 | 6 | 2 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan programnya (desa) | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | | | | | | | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 11 Desa | 100 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | 100% | 4,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 3,096,3 | 12,820 | | | | | | | | | | TOTAL | 3,116,3 | 12,800 | | | | 3,479,82 | 2,100 |

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat provinsi dan Nasional. Di Kecamatan Burau terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Kecamatan Burau yang terdiri atas 11 Desa yang diakomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan sebanyak 22 usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan Tahunan Kecamatan Burau yang selanjutnya diteruskan ke Bappeda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**. Hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga sinkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja belum seiring apalagi dalam mekanisme perencanaan di padukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota DPRD yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak pada ketidak pastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKPD 2021 adalah “ **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”.

Mengacu pada tema, focus dan sasaran pembangan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industry dan perdagangan, pariwisata dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan kedalam tujuh prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat inprastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-4 yaitu “Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam Renja ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk satu tahun kedepan.

Tabel. 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Burau Tahun
2022

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA |
|-----|---|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau | Persentase peningkatan Nilai IKM | Menigkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Burau | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 80 |

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Burau adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Burau dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2020, pelaksanaan Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2020 ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Burau.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Burau, maka pada tahun 2022 Kecamatan Burau melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan;

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- b. Penyediaan Bahan Logistik
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di desa

b. Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:

5.1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

a. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BURAU TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 (n) | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|--|---|---|---|---|-------------|------------|------|---------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Kebutuhan Dana (Rp.) | Sumber Dana | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Dokumen | 100% | 9,148,191 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 3,694,072 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | 3,470,455 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Dokumen | 100% | 12,483,606 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang di susun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 22 Orang | 100% | 2,107,149,950 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang di susun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 18 Dokumen | 100% | 24,485,027 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 10,699,790 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|------|-------------|------|--------------------|--------------------------------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("%) | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu | Persentase Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 10,699,790 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 37,303,689 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | 37,303,689 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 16,938,739 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("%) | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Maleku | 100% | 22 paket | 100% | 1,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("%) | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Dokumen | 100% | 3,088,739 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("%) | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Orang | 100% | 12,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 271,645,900 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 11 Dokumen | 100% | 2,709,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 14 Jenis | 100% | 4,426,650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 6 Jenis | 100% | 8,995,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 48 Exemplar | 100% | 4,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|--|---|---|---|------|-------------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3800 Orang | 100 % | 100,71 5,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 700 Kali | 100 % | 150,00 0,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 317,82 2,100 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100 % | 275,00 0,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | Pengadaan Mebel | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah mebel yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 40 Unit | 100 % | 28,250, 000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Peralatan/ Mesin Lainnya yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Unit | 100 % | 8,000,0 00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100 % | 6,572,1 00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 117,54 7,974 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1500 surat | 100 % | 14,097, 974 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 120 Rekenin | g1 00 % | 52,900, 000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Jenis | 100 % | 6,150,0 00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%) | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 7 Orang | 100 % | 44,400, 000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 48,200, 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|---|--|---|---|------|------------|------|-------------------|--------------------------------------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 18,870,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Unit | 100% | 7,430,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% | 18,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 5 Unit | 100% | 3,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 4,098,916 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | 4,098,916 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah administrasi perizinan yang terbitkan (lembar) | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 Lembar | 100% | 4,098,916 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 62,825,786 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 62,825,786 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah ("%) | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100% | 12,956,560 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang) | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 66 Orang | 100% | 49,869,226 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 12,000,000 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum | | | | | | | | 8,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|------|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi (%) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 % | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Kali | 100 % | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | 4,000,000 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah koordinasi/ sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Kali | 100 % | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 31,406,625 | |
| 7 | 1 | 5 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | 31,406,625 | |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Diselenggarakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 % | 31,406,625 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 25,391,980 | |
| 7 | 1 | 6 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 25,391,980 | |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 22 Dokumen | 100 Per sen | 3,213,105 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 Per sen | 6,811,865 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|--|---|---|---|------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|
| 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase penyelenggaraan pemerintahan di desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasi | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 Per sen | 12,367,010 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Persentase penyelenggaraan pemerintahan di desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-an yang berlaku | Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan programnya (desa) | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 11 Desa | 100 Per sen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | 3,116,312,800 | |

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2022 Kantor Kecamatan Burau merencanakan 5 program, 12 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 3.116.312.800 yang terdiri dari Belanja Operasi dan belanja Modal. Belanja operasi terdiri dari belanja Pegawai sebanyak Rp 2.107.149.950,- dan Belanja Barang Jasa Rp 691.340.750,-, sedangkan belanja modal sebanyak 317.822.100,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Burau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
ALOKASI ANGGARAN KANTOR KECAMATAN BURAU TAHUN 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|--|---|--|--|--|------|--------------|---------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Dokumen | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Dokumen | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Dokume | n 100 % | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang di susun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 22 Orang | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang di susun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 18 Dokume | n 100 % | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("% | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu | Persentase Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|---|--|---|---|------|--------------|---------|--|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu | Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 4 Dokumen | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("%) | Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Maleku | 100% | 22 paket | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("%) | Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Dokume | n 100 % | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ("%) | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Orang | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 11 Dokume | n 100 % | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 14 Jenis | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 6 Jenis | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 48 Exampilar | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3800 Orang | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 700 Kali | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1 Unit | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | Pengadaan Mebel | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah mebel yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 40 Unit | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Unit | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|---|--|---|---|------|--------------|-------|
| 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 1500 surat | 100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 120 Rekening | g100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 2 Jenis | 100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 7 Orang | 100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 12 Unit | 100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 3 Unit | 100% |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ("%) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 5 Unit | 100% |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah administrasi perizinan yang terbitkan (lembar) | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 Lembar | 100% |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah ("%) | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|---|--|--|---|------|------------|--------------|
| 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang) | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 66 Orang | 100 |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi (%) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Kali | 100 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 10 Kali | 100 |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan | Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Diselenggarakan | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 |
| 7 | 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 22 Dokume | n 100 Persen |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | Persentase ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 Persen |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|----|---|--|---|---|---|------|------------|------------|
| 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 100 persen | 100 Persen |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan programnya (desa) | Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kelurahan | 100% | 11 Desa | 100 Persen |
| TOTAL | | | | | | | | | | | TOT | |

**BAB IV
PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Burau tahun 2022 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Burau Tahun 2022, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Burau. Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Burau. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Burau dalam kurun waktu tahun 2022, sehingga upaya Kantor Kecamatan Burau dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Kecamatan Burau Tahun 2022 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Burau, 05 Juli 2021
CAMAT,

Dra. SRI MULYANI, M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. : 19690227 199710 2 001

